

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjaga stabilitas keamanan di dalam suatu wilayah sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap *stakeholder* wilayah. Hal ini guna memenuhi kebutuhan negara untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara dari segala bentuk ancaman. Pada tahun 2015, Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, mengelompokkan ancaman menjadi dua dimensi ancaman utama.¹ *Pertama* ancaman nyata, yaitu ancaman yang sedang dan mungkin dialami oleh negara-negara kawasan baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara. *Kedua*, ancaman belum nyata, yaitu ancaman konflik terbuka dan perang konvensional.

Konflik terbuka dan perang konvensional bisa terjadi kapan saja. Keduanya berasal dari perbedaan atau sengketa yang tidak terselesaikan sebelumnya. Perkembangan dinamika sosial dimana berbagai sengketa dan potensi konflik yang berpotensi menjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia dapat menyulut tindakan anarkisme bahkan kerusuhan. Hal ini tentu akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah lokasi yang bersengketa dan berpotensi konflik bahkan jika tidak tertangani dengan baik tidak saja mengganggu stabilitas keamanan wilayah tersebut, lebih jauh lagi dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional sehingga perlu adanya deteksi dan cegah dini terhadap berbagai sengketa dan potensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik. Deteksi dini dan cegah dini terhadap sengketa dan potensi konflik perlu dilakukan diberbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang.

Kota Padang merupakan salah satu kota di Indonesia yang unik dimana budaya dan agama bisa berjalan berdampingan dalam

¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Strategi Pertahanan Negara* (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. v.

kehidupan masyarakatnya. Masyarakat kota Padang memegang teguh nilai keagamaan, nilai adat, dan kearifan lokal dimana ketiga unsur tersebut telah menjadi tradisi secara turun temurun dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dengan memegang filosofi hidup *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*² masyarakat Minangkabau pada umumnya, dan masyarakat kota Padang pada khususnya menjadikan filosofi tersebut sebagai acuan dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan ber-nagari. Berbagai nilai-nilai dalam masyarakat Kota Padang tercipta dengan memuat sistem nilai dan norma sosial sebagai bentuk etika yang saling berkaitan dan melekat pada lingkungan masyarakat Kota Padang serta diyakini kebenarannya dan terimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Padang, sehingga nilai-nilai tersebut masih relevan dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak terjadinya gempa bumi yang melanda kota Padang pada tahun 2007 dan 30 September 2009 lalu dengan *magnitude* 7,6 Skala Richter (SR) mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang melanda berbagai sektor di kota Padang. Menurut data BNPB, Bappenas, dan Pemerintah Sumatera Barat dan Jambi³ sektor infrastruktur mengalami kerugian dan kerusakan yang paling besar. Kemudian diikuti oleh sektor layanan sosial khususnya pada subsektor kesehatan. Sektor produktif menempati urutan ketiga khususnya subsektor perdagangan. Sedangkan lintas sektor menempati urutan keempat khususnya pada subsektor pemerintahan. Berbagai kerusakan dan kerugian menyebabkan pemerintah kota Padang berusaha mencari investor agar perekonomian tumbuh dengan cepat serta menurunkan tingkat

² Adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Qur'an dan Hadist, syariat berkata adat memakai.

³ BNPB, Bappenas, dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan Jambi, *West Sumatera and Jambi Natural Disasters: Damage, Loss, and Preliminary Needs Assessment* (Jakarta: BNPB, 2009), hlm. 28.

pengangguran dan kriminalitas kota Padang pasca bencana gempa bumi.

Pada tahun 2010 Fauzi Bahar⁴ menemui Ismail Ning⁵ di Jakarta dimana pada saat itu Ismail Ning menjabat sebagai Presiden Komisaris Lippo Group. Setelah presentasi dan serangkaian pembicaraan, akhirnya Ismail bersedia turut serta membangun sektor infrastruktur kota Padang dengan mendirikan kawasan terintegrasi atau *superblock* yang berisikan pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit dan sekolah di Kota Padang.⁶ Dengan begitu pemerintah Kota Padang sepakat mengadakan kerja sama dengan salah satu anak Lippo Grup, yaitu PT. Surya Persada Lestari yang dipimpin oleh Ismail Ning untuk membangun infrastruktur Kota Padang. Lippo Grup melalui PT. Surya Persada Lestari menginvestasikan Rp 2 triliun untuk proyek *superblock* ini dengan luas bangunan 94 ribu meter persegi.⁷

Pada 10 Mei 2013 proyek ini diresmikan dengan menggelar peletakan batu pertama (*ground breaking*). Acara ini dihadiri oleh Ketua DPD RI Ir. Irman Gusman, Menko Kesra RI Dr. HR. Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat RI Djan Faridz, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar,

⁴ Letkol Laut (P) (Purn.) Dr. H, Fauzi Bahar, M. Si dipilih menjadi walikota Padang pada tahun 2004 melalui sistem perwakilan DPRD Kota Padang. Kemudian pada tahun 2009, ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai walikota Padang dalam pemilihan langsung.

⁵ H. Masagoes Ismail Ning atau Ismail Ning merupakan salah satu pengusaha muda yang dipandang sukses di Indonesia. Ia adalah anak dari Mas Agus Nur Muhammad Hasyim Ning dan Ratna Maida yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ayah Ismail Ning merupakan pensiunan tentara dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel yang kemudian merintis dalam dunia bisnis dan menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Ibu Hasyim Ning merupakan seorang aktivis Islam dan pengusaha Indonesia. Hasyim Ning mengelola beberapa perusahaan diantaranya Presiden Direktur PT. Internux, Chairman Pacto Ltd., Komisaris PT. Bank Lippo Tbk (1996-2003) dan Presiden Komisaris Metropolis Propertindo Utama. Ismail Ning juga menjabat sebagai presiden Komisaris PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk

⁶ Zulfadli dan Beni Kharis Arrasuli, "Kuasa Ormas di Ranah Minang: Penolakan Ormas Keagamaan Terhadap Pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Padang, *Sosial Budaya*, Volume. 14, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 35.

⁷ [Andri El Faruqi, "Lippo Group Investasi Rp 2 Triliun di Padang". dalam https://bisnis.tempo.co/read/479431/lippo-group-investasi-rp-2-triliun-di-padang](https://bisnis.tempo.co/read/479431/lippo-group-investasi-rp-2-triliun-di-padang) diakses pada 17 Juli 2018.

Ketuan BNPB Mayjen TNI (Purn.) Syamsul Maarif, Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Sumatera Barat, MUSPIDA Kota Padang, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Tokoh Agama Buya Mas'oe'd Abibidin, Tokoh Masyarakat Padang Ny. Ratna Hasyim, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Fasli Djalal, Brigjen Pol Noer Ali, Letnan Jendral TNI (Purn.) Azwar Anas, Pemimpin Umum Harian Singgalang H. Basril Djabar, Kepala Cabang Permata Bank Padang: Rukiat Tasib, Presiden Lippo Karawaci Tbk Theo L. Sambuga, CEO Lippo Group James T. Riady, dan Presiden Direktur Lippo Karawaci Tbk. Ketut Budi Wijaya. *Ground breaking* proyek *superblock* PT. Surya Persada Lestari tersebut meliputi Lippo Mall Padang, Hotel Aryaduta, Rumah Sakit Internasional Siloam, dan Sekolah Pelita Harapan.

Untuk proyek pertama, PT. Surya Persada Lestari akan membangun rumah sakit berstandar internasional dengan peralatan modern berkapasitas 300 tempat tidur pasien yang menelan investasi sebesar Rp 400 miliar. Untuk nama rumah sakit ini pada saat peresmiannya belum diputuskan karena menunggu masukan nama dari tokoh-tokoh masyarakat Kota Padang. Untuk proyek kedua, PT. Surya Persada Lestari membangun Hotel Aryaduta yang merupakan hotel berbintang lima dengan kapasitas 200 kamar megah dengan investasi sebesar Rp 300 miliar. Sedangkan proyek ketiga akan membangun sekolah nasional plus dengan nama Sekolah Padang Harapan yang mempunyai kapasitas 1680 siswa dari jenjang TK sampai dengan SMA. Selain itu, juga akan dibangun Lippo Plaza yang memiliki fasilitas pusat perdagangan menengah atas seluas 55.500 meter persegi dengan *anchor tenant* yang sudah siap mengisi pusat perbelanjaan ini antara lain adalah Hypermart, Matahari Departement Store, bioskop, fitness center dan jasa perbankan.⁸

⁸ Feriawan Hidayat, "Lippo Bangun Tiga Proyek di Padang Senilai Rp 1,3 Triliun" dalam <http://www.beritasatu.com/properti/112974-lippo-bangun-tiga-proyek-di-padang-senilai-rp-13-triliun.html> diakses pada 2 Agustus 2018.

Namun, sejak diresmikannya proyek *superblock* milik PT. Surya Persada Lestari ternyata memberikan guncangan pada kondisi sosial masyarakat kota Padang. Pada tanggal 18 Mei 2013 berbagai pimpinan Organisasi Masyarakat (ormas) Sumatera Barat⁹ dalam pertemuannya di kantor LKAAM Sumbar menegaskan bahwa Sumatera Barat adalah provinsi yang memegang teguh filosofi *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru* maka masyarakatnya menolak adanya proyek yang merupakan bagian dari Lippo Grup karena adanya isu penyebaran agama (kristenisasi) melalui berbagai kepentingan yang dibawa, seperti pembangunan pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel dan sejenisnya.¹⁰

Setelah adanya pertemuan tersebut, pada tanggal 3 Juni 2013 diadakan rapat bersama antara MUI Sumbar, LKAAM dan Ormas Islam Sumbar yang bertempat di Aula Masjid Nurul Iman Padang. Pertemuan ini bertujuan untuk menyikapi pembangunan proyek *superblock* PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Dalam pertemuan ini disimpulkan bahwa (1) Sangat dikhawatirkan proyek *Superblock* Lippo Group membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai* yang menjadi titik tolak Pembangunan Sumbar; (2) Pemerintah, MUI, LKAAM dan ormas-ormas Islam memiliki tugas bersama untuk membina, membentengi

⁹ Ormas yang hadir pada saat itu adalah LKAAM (Lembaga Kerapatan Alam Adat Minang) Sumbar, Bundo Kandung Sumbar, MUI Sumbar, PW Muhammadiyah Sumbar, PW Nadhatul Ulama Sumbar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Pewarna Sumbar, Panji Alam Minangkabau (PAM), Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar, LKAM (Lembaga, Kerapatan Adat Minangkabau) Kota Padang, Dewan Da'wah Sumbar, Perti Sumbar, LDII Sumbar, Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM) Sumbar, Libas, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) Paga Nagari, Front Masyarakat Pembela Islam (FPMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

¹⁰ Jimmy Syah Putra Ginting, "Eksistensi Kearifan Lokal dan Geliat Investasi (Berkaca dari Polemik Pendirian Super Blok Lippo Group di Padang)", dalam <https://www.gentaandalas.com/eksistensi-kearifan-lokal-dan-geliat-investasi-berkaca-dari-polemik-pendirian-super-blok-lippo-group-di-padang/#> diakses pada 17 Juli 2018.

dan menyelamatkan akidah umat; (3) Menolak pembangunan *Superblock* Lippo Group dan meminta pemerintah serta DPRD Kota Padang untuk membatalkan izin pembangunan *Superblock* Lippo Group tersebut; (4) Meminta pemerintah dan DPRD Sumbar membatalkan izin pembangunan *Superblock* Lippo Group demi menghindari keresahan masyarakat; (5) mengamanahkan kepada MUI Sumbar untuk membentuk Tim Koordinasi yang akan menyatukan *fikrah* (pemikiran) dan *harakah* (tindakan) untuk menolak pembangunan *Superblock* Lippo Group; (6) Semua peserta rapat menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh MUI Sumbar dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya, yaitu menolak pembangunan *Superblock* Lippo Grup.¹¹

Dikutip dari laman Genta Andalas, Buya Gusrizal Gazahar (Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar) mengungkapkan beberapa pertimbangan penolakan pembangunan proyek *superblock* PT. Surya Persada Lestari, *pertama* dari sisi aqidah investasi proyek PT. Surya Persada Lestari merupakan investasi yang berselubung pemurtadan masyarakat kota Padang dimana James T. Riadi sebagai CEO Lippo Group merupakan seorang penginjil dari aliran Kristen radikal. *Kedua*, dikaji dari aspek ekonomi kota Padang tidak begitu memerlukan bentuk investasi yang akan dilakukan PT. Surya Persada Lestari.¹²

Aksi demonstrasi pun dilakukan untuk menyuarakan penolakan proyek *superblock* PT. Surya Persada Lestari ini. Pada 28 November 2013, ribuan orang dari berbagai ormas Islam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Padang Sumatera Barat untuk menolak proyek pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Aksi ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dilakukan dengan *long*

¹¹ Surat Keputusan Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat tanggal 03 Juni 2013 . Lihat lampiran hlm.

¹² *Loc.cit*, Jimmy Syah Putra Ginting,

march dari Masjid Nurul Iman Padang menuju Kantor DPRD Padang.¹³ Setelah dialog yang 'alot' di dalam kantor DPRD Kota Padang, akhirnya DPRD Kota Padang yang diwakili oleh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rekomendasi investasi pembangunan Rumah Sakit Siloam dan *superblock* PT. Surya Persada Lestari dan menemui para demonstran yang menunggu di luar gedung DPRD Kota Padang. Dikutip dari sindonews.com anggota DPRD dari Fraksi PKS memberikan pernyataan:¹⁴

"Kami mencabut rekomendasi butir 3, pembangunan rumah sakit Siloam dan pusat perbelanjaan Lippo *Superblock* yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No.26 tahun 2013 tanggal 12 November 2013 tentang Rekomendasi Investasi di Kota Padang".

Budiman S.Ag, M.M., selaku perwakilan dari DPRD Kota Padang fraksi PKS, memberikan dua alasan mengapa dicabutnya rekomendasi tersebut. *Pertama* adanya tuntutan masyarakat Minang baik yang berada di Sumatera Barat ataupun yang tidak berada di Sumatera Barat (perantau) melalui Forum Masyarakat Minangkabau untuk menolak investasi PT. Surya Persada Lestari. *Kedua*, untuk menghindari terjadinya perpecahan yang berakibat pada rusaknya tatanan sosial dan kemasyarakatan di Sumatera Barat. Keputusan inipun disambut dengan baik oleh para demonstran dan pihak-pihak yang kontra dengan rencana proyek investasi PT. Surya Persada Lestari ini.

Senin 17 Februari 2014 aksi demonstrasi kembali terjadi bersamaan dengan acara perpisahan yang diadakan oleh ibu-ibu majelis taklim untuk Walikota Padang Fauzi Bahar di kediamannya.

¹³ Rus Akbar, "Ribuan Orang Geruduk Kantor DPRD Padang Tolak RS Siloam" dalam <https://news.okezone.com/read/2013/11/28/340/904114/ribuan-orang-geruduk-kantor-dprd-padang-tolak-rs-siloam> diakses pada 12 Agustus 2018.

¹⁴ Rus Akbar, "PKS Tolak Pembangunan RS Siloam & Lippo Superblock" dalam <https://daerah.sindonews.com/read/811179/24/pks-tolak-pembangunan-rs-siloam-lippo-superblock-1385628749> diakses pada 12 Agustus 2018. Lihat pula <https://www.youtube.com/watch?v=kxf7vGnYxVo> untuk video dokumentasi pernyataan perwakilan DPRD Kota Padang dari fraksi PKS.

Di tengah acara tersebut, Fauzi Bahar mendapat informasi bahwa massa beraksi di depan kediamannya. Saat itu juga di dalam acara tersebut, Fauzi Bahar secara tegas menuding aksi demonstrasi dan massa yang datang difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dalam acara tersebut Fauzi Bahar menyatakan bahwa pembangunan yang diizinkan hanya pusat perbelanjaan dengan hotel namun masih saja di demo. Fauzi Bahar menuding ada pihak-pihak yang menggerakkan massa dan menyebut gubernur sebagai penggeraknya karena massa bergerak diawali dari kantor gubernur hingga berakhir di kediaman Fauzi Bahar.¹⁵ Hal ini membuat Fauzi Bahar sangat kecewa. Irwan Prayitno angkat bicara soal tuduhan mendalangi demo. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin seorang gubernur melakukan hal tersebut.¹⁶

PT. Surya Persada Lestari merupakan bagian dari Lippo Grup yang bergerak di bidang perdagangan. Lippo Grup merupakan salah satu pengembang properti multinasional dimana lebih dari satu dekade perusahaan ini telah dipercaya untuk mengembangkan properti dari *brand* ternama. Tidak hanya pada bidang properti saja, Lippo Grup memperluas bisnisnya ke bidang pembangunan *housing development*, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, tempat rekreasi, media, *entertainment*, dan pendidikan.

Lippo Grup dipimpin oleh James Tjahja Riady yang beretnis Tionghoa-Indonesia. James T. Riady adalah penerus keluarga Muchtar Riadi yang merupakan pendeta internasional yang berguru kepada Pat Robertson, yang dikenal sebagai misionaris internasional dan sempat mencela umat Islam pada tahun 2006.¹⁷ Kedekatan

¹⁵ Liputan Padang TV, "Fauzi Bahar VS PKS Panaskan Politik Kota Teluru Seg 1" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=bqR6mRNs15Q> diakses pada 12 Agustus 2018.

¹⁶ Didi Syafradi, Di Balik Marahnya Walikota Padang, Mal & Hotel Lipo Diberi Izin, diakses melalui <https://www.merdeka.com/politik/di-balik-marahnya-wali-kota-padangmal-hotel-lippo-diberi-izin.html> pada 12 Agustus 2018.

¹⁷ Lihat Zulfadli dan Beni Kharis Arrasuli, "Kuasa Ormas di Ranah Minang: Penolakan Ormas Kegamaan Terhadap Pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Padang", Jurnal *Sosial Budaya* Vol. 14 No. 1 Juni 2017, hlm. 37. Lihat pula The Associated Press, *The New York Times* bahwa pada sebuah acara di *channel*

James T. Riady dengan Pat Robertson membuat masyarakat kota Padang menolak proyek yang dijalankan oleh PT. Surya Persada Lestari karena keduanya dianggap telah mencela Islam dan berniat melakukan kegiatan missionaris yang terselubung.

Dikutip dari laman minangkabaunews.com menurut Kadis TRTB Padang Afrizal BR bahwa IMB pembangunan mall dan hotel di jalan Khatib Sulaiman itu telah dikeluarkan sejak 20 Januari 2014 namun kemudian dua bulan setelah itu walikota Padang mengadakan peninjauan retribusi.¹⁸

Pada 9 Januari 2015 lalu puluhan ormas Islam di Sumatera Barat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang (FMM) mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasinya mengenai penolakan pembangunan PT. Surya Persada Lestari. Mereka menyampaikan penolakan pembangunan PT. Padang Landmark karena dinilai akan mematikan usaha para pedagang kecil yang berada di beberapa titik kawasan sekitar pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan Padang Landmark dianggap melanggar beberapa peraturan diantaranya: (1) melanggar Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (2) melanggar Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (4) melanggar Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, (5) melanggar

Christian Broadcasting Network (CBN) yaitu "The 700 Club" Pat Robertson ditanyakan pendapatnya mengenai Islam dan imigran Muslim di Amerika Serikat. Pat Robertson merespon dengan mengatakan bahwa Islam sebuah agama kekerasan yang ingin mendominasi dan jika perlu menghancurkan. Mengenai imigran Muslim Pat Robertson merespon bahwa sebagai missionaris mungkin untuk menyebarkan doktrin Islam karena Islam bukanlah agama damai yang ingin hidup berdampingan. Adapun keinginan hidup berdampingan sampai mereka dapat mengontrol, mendominasi dan kemudian, jika perlu, menghancurkan. Sumber: <https://www.nytimes.com/2002/02/23/us/nation-challenged-religious-right-islam-violent-nature-pat-robertson-says.html> diakses pada 1 Agustus 2018.

¹⁸Anonim, Terkait Padang Landmark, Pemko Padang Segera Panggil Ismail dan Dasrul" dalam "<https://minangkabaunews.com/artikel-6218-terkait-padang-landmark-pemko-padang-segera-panggil-ismail-dan-dasrul.html> diakses pada 17 Juli 2018.

Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sengketa merupakan lingkup terkecil dari konflik. Ketika sengketa yang terjadi tidak dihadapi dan ditangani dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait maka sengketa dapat membesar dan masuk ke ranah konflik. Lebih lanjut, konflik ini dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah kota Padang jika tidak ditangani dan dideteksi sejak dini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat di Kota Padang Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah”**.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang menuntut pokok masalah bersifat umum. Sedangkan subfokus penelitian adalah sudut tinjauan dari permasalahan pokok yang ada dalam fokus penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tersebut agar tercipta *postive peace* guna menjaga stabilitas keamanan wilayah, maka disusunlah fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut:

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah upaya penyelesaian sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang guna menjaga stabilitas keamanan wilayah. Berbagai pertentangan yang muncul dalam investasi PT. Surya Persada Lestari menyebabkan timbulnya sengketa diantara PT. Surya Persada Lestari dan masyarakat Kota Padang. Sengketa ini dimulai setelah

Lippo Grup meresmikan proyek investasi PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang pada tahun 2013 dan hingga tesis ini ditulis sengketa tersebut belum ada penyelesaiannya. Apabila sengketa ini berlarut-larut dikhawatirkan akan berpotensi menjadi konflik yang bersifat laten dan suatu saat akan muncul kepermukaan dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban sosial masyarakat Kota Padang. Oleh karena itu, demi menjaga situasi dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram dan damai diperlukan suatu upaya penyelesaian sengketa.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Secara spesifik penelitian yang dilakukan kepada permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus penelitian yaitu:

1. Dinamika sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang.
2. Upaya penyelesaian sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang agar tercipta perdamaian positif (*positive peace*) guna menjaga stabilitas keamanan wilayah.

1.3 Rumusan Masalah

Investasi PT. Surya Persada Lestari mendapatkan izin dari pemerintah kota Padang namun mendapatkan penolakan dari masyarakat kota Padang dengan beredarnya berbagai isu diantaranya isu penyebaran agama (kristenisasi), persaingan bisnis dan pelanggaran peraturan daerah. Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti terkait dengan sengketa dan pertentangan akan kehadiran PT. Surya Persada Lestari dimana mendapatkan penolakan dari masyarakat kota padang yang dapat mengakibatkan potensi konflik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota Padang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota Padang guna menjaga stabilitas keamanan wilayah kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hal-hal berikut :

1. Untuk menganalisis dinamika sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota Padang.
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota Padang guna menjaga stabilitas keamanan wilayah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan sebagai salah satu bentuk penerapan teori dan konsep yang telah dipelajari dalam proses belajar pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan. Dengan demikian penelitian ini dapat memperkaya penelitian mengenai penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah serta memperkaya bahan referensi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan serupa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Setelah selesai melaksanakan kegiatan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada aktor-aktor yang berperan dalam sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dan masyarakat Kota Padang beserta pihak pemerintah yang berperan sebagai regulator. Rekomendasi yang diberikan diharapkan

dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian sengketa ini. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan untuk kasus yang serupa.